

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PBB-P2 PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAHAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) DI KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Iriyanti Romera¹, Richard Djiko²

^{1,2}Program Studi Manajemen Bisnis, Politeknik Perdamaian Halmahera
Email : chakens90@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of urban and rural land and building tax collection in North Halmahera Regency. The method used in this research is descriptive qualitative. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used in this study are data reduction, data display presents data) and drawing / verification. (Verification of data). From the results of this study it can be concluded that there is still a lack of human resources, and there is still a lack of socialization to the community regarding how the procedure for paying taxes, so there are still taxpayers who have not reported changes to the building, making it difficult for tax officials to record and calculate the appropriate tax amount.

Keywords : *Effectiveness, PBB-P2 tax*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas pemungutan pajak Bumi bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Halmahera Utara. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di pakai ialah Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Reduksi data, Data display (menyajikan data) dan Drawing/Verification. (Verifikasi data). Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa masih kurangnya SDM, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana prosedur untuk membayar pajak, sehingga masih ada wajib pajak yang belum melaporkan perubahan pada bangunan sehingga menyulitkan petugas pajak untuk mendata dan menghitung jumlah besaran pajak yang sesuai.

Kata Kunci : Efektifitas, pajak PBB-P2

PENDAHULUAN

Semenjak undang-undang otonomi daerah di berlakukan, pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Manggalatung, Sabijono, and Afandi 2019) menjelaskan bahwa semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa model baru pada suatu daerah, di dalam undang-undang ini daerah diberikan kewenangan untuk

mengelola sendiri kegiatannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan di mana otonomi daerah memiliki peran sebagai upaya pemberdayaan daerah untuk mengambil keputusan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Pajak daerah merupakan suatu jenis pajak yang di pungut oleh pemerintah di daerah setempat dan di peruntukan untuk pendapatan daerah tersebut.

Pajak sifatnya mengikat, berdasarkan undang-undang, sehingga mewajibkan wajib pajak untuk dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal yang sama juga yang dikemukakan oleh P.J.A. Andrian dalam (Mufliha and Selvi 2021) menjelaskan bahwa "Pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk dapat mebayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap berjalan tidaknya suatu instansi ataupun perusahaan. Di dalam melaksanakan suatu pekerjaan apabila ada pegawai yang merangkap dua pekerjaan sekaligus dapat berpengaruh terhadap hasil dari suatu pekerjaan. Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlunya banyak unsur penunjang, baik itu SDM maupun alat bantu lainnya yang di gunakan untuk peningkatan pelayanan.

Sumber daya manusia untuk pemungutan pajak pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) sangat terbatas, di karenakan kurangnya tenaga kerja dan sarana prasarana pada bagian pengawas pajak sehingga sering kali pegawai harus lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya.

METODE

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Instrumen/alat bantu di dalam penelitian ini yaitu peneliti itu sendiri dan *voice recorder*. Di dalam mengumpulkan data penulis menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik dari Miles dan Huberman yaitu Reduksi data, *Data display* (menyajikan data) dan *Drawing/Verification*. (Verifikasi data). Praja et al., dalam (Djiko and Dalensang 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di sesuaikan dengan rumusan masalah mengenai Bagaimana efektivitas Kinerja Pegawai dalam rangka pemungutan PBB-P2 di Dinas Pendapat Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara. Salah satu pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana dengan sumber daya manusia yang ada pada kantor Dinas Pendapat Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) maka data penelitian yang di peroleh dapat di jelaskan pegawai pada kantor Dinas Pendapat Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) khususnya di bidang pendapatan masih kurang, dan bagian pelayanan hanya terdapat dua orang pegawai dalam pelaksanaan pekerjaan pegawai, sehingga sering lembur bahkan Kepala bidang dan Kepala seksi juga harus turun lapangan untuk ikut menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya di kerjakan oleh pegawai yang bertugas di lapangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi, karena tanpa Sumber daya manusia maka di dalam suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Begitu pula dalam hal pemungutan pajak apabila tidak didukung dengan hal ini maka apa yang menjadi tujuan tidak akan berjalan secara maksimal.

(Noerdwiansyah and Sutrisno 2024) Menjelaskan bahwa efektifitas merupakan suatu ukuran untuk bagaimana menilai berhasil tidaknya apa yang menjadi tujuan dalam organisasi. Untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut, perlu adanya fasilitas penunjang yang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut dapat dikerjakan secara baik.

Hasil penelitian yang lain yang menjadi temuan adalah bagaimana dengan Sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pembayaran pajak PBB-P2 maka data penelitian yang di peroleh adalah pemerintah kabupaten sudah berupaya sebaik mungkin melakukan sosialisasi, baik itu turun langsung ke kecamatan dan desa, selain itu pemerintah juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dan Online, sehingga pemerintah tetap berusaha agar semua masyarakat dapat mengerti bagaimana prosedur pembayaran pajak PBB-P2 di kabupaten Halmahera Utara.

Hasil penelitian berikutnya adalah mengenai bagaimana hambatan dalam efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di kabupaten Halmahera utara. Yang menjadi kendala/hambatan adalah (1) Masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan perubahan pada bangunan mereka, sehingga petugas pajak kesulitan untuk melakukan pendataan dan perhitungan besaran pajak. (2) Menurut hasil wawancara di lapangan dengan wajib pajak menjelaskan bahwa masih kurang informasi sehingga masih ada wajib pajak yang tidak mengerti tentang bagaiman prosedur pembayaran dan tenggat waktu dan pelayanan yang cukup lama sehingga menunggu antrian yang lama.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa masih kurangnya SDM, dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana prosedur untuk membayar pajak, sehingga masih ada wajib pajak yang belum melaporkan perubahan pada bangunan sehingga menyulitkan petugas pajak untuk mendata dan menghitung jumlah besaran pajak yang sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

- Djiko, Richard, and Remelia Dalensang. 2021. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Pitu." *Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 6 (1): 1–15. <http://ejournal.ipdn.ac.id/jpdpp>.
- Manggalatung, Rara Hillary, Harijanto Sabijono, and Dhullo Afandi. 2019. "Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Toraja Utara." *Jurnal EMBA* 7 (1): 1101–10.
- Mufliha, Zakia, and Selvi. 2021. "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Bappenda Kabupaten Bogor." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1 (1): 1–13. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295>.
- Noerdwiansyah, Arif, and Erwan Sutrisno. 2024. "Efektivitas Pemungutan PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." *Manajemen Dirgantara* 17 (1): 291–95.